

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Abdul Halim (2012:1). Tujuan utama diadakannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Daerah otonom yang diberi wewenang untuk mengatur diri sendiri membutuhkan sumber-sumber dana untuk menjalankan misi perekonomian daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dibebankan kewajiban untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dengan sedikit bantuan dana dari pemerintah pusat. Anggaran pemerintah yang disalurkan melalui SKPDnya mempunyai peran penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Anggaran pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Permendagri No 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD itu sendiri terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena

masyarakat sebagai pemberi dan publik (*publik fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, membelanjakan relatif lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan menghasilkan suatu pendapatan. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan, (Mahmudi,2010:78). Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.

Analisis belanja sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada *output* dan *outcome* dari anggaran.

Dalam penelitian ini tidak semua komponen belanja yang akan diteliti, tapi penelitian lebih difokuskan pada belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi,

dan jaringan dan aset tetap lainnya. Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Pelaksanaan belanja modal daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran dengan realisasi yang diharapkan dari kegiatan dan program. Dengan demikian, pendekatan kinerja sekaligus akan mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Efisiensi akan diwujudkan dengan kesesuaian antara *input* dengan *ouput* yang paling optimal yang bisa dihasilkan. Sedangkan efektivitas akan diwujudkan dengan kesesuaian antara output dengan ekspektasi masyarakat terhadap pemenuhan kualitas dan kuantitas layanan publik yang dihasilkan.

Mengingat betapa pentingnya peran belanja modal dalam menggerakkan roda perekonomian pada Pemerintah, sehingga anggaran dan realisasi belanja modal harus benar-benar diperhatikan secara baik. Pengoptimalisasi belanja modal dari anggaran yang sudah ditetapkan harus dilakukan secara efektif agar aset tetap daerah (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan) dalam ketersediaannya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun pada kenyataannya, masih ada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang belum mengoptimalisasikan anggaran belanja modal secara baik. Kendati sudah diatur oleh Permendagri No 21 Tahun 2011 yang

merupakan perubahan dari Permendagri No 13 Tahun 2006, Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum memanfaatkan secara maksimal APBD yang disalurkan oleh pemerintah. Berikut adalah data laporan realisasi anggaran belanja modal Dinas Pendidikan Provinsi NTT tahun anggaran 2017:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Pendidikan
Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017

No.	Belanja modal	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1.	Belanja modal peralatan dan mesin	34.526.481.472	14.400.073.486	41,71
2.	Belanja modal gedung dan bangunan	44.364.141.751	41.474.647.988	93,49
3.	Belanja modal aset tetap lainnya	750.000	750.000	100,00
4.	Jumlah	78.871.373.223	55.875.471.474	70,84%

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi NTT, 2018 (data diolah)

Dilihat dari tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi belanja modal pada dinas pendidikan provinsi NTT di tahun 2017 belum mencapai target yang ditetapkan. Secara menyeluruh, realisasi belanja pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT masuk dalam kategori berhasil, karena mencapai angka 70,84% (berhasil : 70% - 85%). Tetapi, jika dilihat per itemnya ada dua Jenis belanja modal, yaitu belanja modal gedung dan bangunan (93,49%) serta belanja modal aset tetap lainnya (100%) yang realisasinya sudah masuk dalam kategori sangat berhasil (sangat berhasil : $\geq 85\%$). Sedangkan, belanja modal peralatan dan mesin (41,71%) realisasinya masuk dalam kategori belum berhasil (belum berhasil : $\leq 55\%$). Secara menyeluruh, realisasi belanja modal

pada Dinas Pendidikan dikatakan berhasil karena mencapai 70,84%. Namun, jika dilihat dari sisa anggaran yang besar, menggambarkan bahwa pengelolaan anggaran belum maksimal karena realisasinya lebih kecil dari yang dianggarkan sehingga adanya program atau kegiatan yang belum dijalankan, terkhususnya pada item belanja modal peralatan dan mesin realisasinya sangat minim. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, yakni kurangnya pelayanan publik pada sektor pendidikan yang dapat memupuskan salah satu tujuan bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena apa yang dianggarkan pemerintah adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pelajar dan para pendidik. Jadi, jika anggaran tidak terealisasi semua, maka kesejahteraan masyarakat dalam dunia pendidikan juga tidak dapat tercapai, yang dikarenakan oleh minimnya daya dukung dari pemerintah berupa fasilitas penunjang pembelajaran yang telah dianggarkan dalam anggaran belanja modal Dinas Pendidikan Provinsi NTT.

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Belanja Modal Pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pengelolaan Belanja Modal Pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat perealisasi belanja modal pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Belanja Modal pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT, dan untuk mengetahui alasan tidak terealisasinya semua anggaran yang telah ditetapkan.

1.4 Manfaat penelitian

1. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai pengelolaan anggaran belanja modal Pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pengelolaan anggaran belanja modal khususnya dan manajemen pengelolaan keuangan daerah umumnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan belanja modal.